

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis, karakteristik pendidikan yang tercermin melalui rata-rata lama sekolah (RLS), rumah tangga yang pernah mengakses internet, rasio subsidi pendidikan per jumlah siswa, dan rasio jumlah sekolah per jumlah penduduk/siswa usia sekolah dalam menjelaskan tingkat kerentanan suatu wilayah pada kerawanan pangan di Indonesia terdapat tiga *pathway*.

- a) *Pathway* satu menggambarkan wilayah dengan RLS yang tidak optimal serta rasio subsidi pendidikan per jumlah siswa yang tidak optimal. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan capaian pendidikan dan dukungan pembiayaan pendidikan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia tersebut membatasi peluang kerja, produktivitas, serta kemampuan adaptasi rumah tangga dalam mengelola sumber daya, sehingga kerentanan wilayah pada kerawanan pangan yang terjadi di provinsi NTB, Kalimantan Barat, NTT, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Jawa Barat.
- b) *Pathway* dua memperlihatkan bahwa provinsi dengan subsidi pendidikan optimal dan rasio jumlah sekolah per penduduk usia sekolah yang optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa dukungan pembiayaan dan ketersediaan satuan pendidikan secara umum berada pada tingkat yang memadai. Namun, pemanfaatan pendidikan yang belum merata di seluruh kelompok penduduk sehingga peningkatan kapasitas pendidikan tidak berlangsung secara menyeluruh. Keterbatasan tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam mengelola dan mempertahankan akses pangan, sehingga wilayah tetap berada dalam kondisi rentan terhadap kerawanan pangan di provinsi Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Papua, Bengkulu, dan Aceh.

- c) *Pathway* tiga menunjukkan bahwa terdapat provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah optimal, rumah tangga yang mengakses internet yang optimal, dan rasio jumlah sekolah per jumlah penduduk/siswa usia sekolah yang tidak optimal. *Pathway* ini memperlihatkan bahwa capaian pendidikan dan akses informasi yang tinggi belum sepenuhnya diimbangi oleh pemerataan infrastruktur pendidikan. Ketimpangan dalam akses dan pemanfaatan pendidikan tersebut membatasi peningkatan kapasitas sebagian kelompok masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan kemampuan wilayah dalam menjamin akses pangan yang memadai dan berkelanjutan, sehingga kerentanan wilayah pada kerawanan pangan terjadi di provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Riau, D.I Yogyakarta, Bali, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sumatera Barat.

5.2 Saran

a) Aspek Teoritis

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel pendidikan lainnya dengan metode yang berbeda agar terlihat pola kausal yang paling dominan dalam menjelaskan kerentanan wilayah pada kerawanan pangan secara lebih menyeluruh.
- b. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan metode *ordered probit* untuk menganalisis kondisi pendidikan terhadap tingkat kerentanan wilayah pada kerawanan pangan yang diklasifikasikan secara ordinal dari tingkat rendah hingga tinggi.
- c. Dengan keterbatasan QCA yang hanya menjelaskan konfigurasi kondisi, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi pendekatan lain agar dapat mengukur besaran pengaruh masing-masing variabel terhadap tingkat kerentanan wilayah pada kerawanan pangan.

b) Aspek Praktis

Secara praktis, provinsi dengan tingkat subsidi pendidikan dan jumlah sekolah yang tinggi harus memastikan bahwa meningkatnya jumlah tersebut diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, akses yang adil, dan penggunaan anggaran yang efektif, agar dukungan pendidikan yang tersedia benar-benar

bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, provinsi dengan tingkat rata-rata lama sekolah yang tinggi dan akses internet yang baik dapat mengoptimalkan kapasitas pendidikan mereka melalui perluasan literasi digital, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan penggunaan *platform* pendidikan untuk mendukung peningkatan kompetensi masyarakat. Secara umum, pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk memperkuat kerjasama antara program pendidikan dan kebijakan sosial agar karakteristik pendidikan yang optimal dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memahami kondisi masyarakat dan tingkat kerentanan wilayah pada kerawanan pangan.